

**PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DALAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PEUNAYONG
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**BIHUNA BILNAFSIH
NIM. 160802065**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bihuna Bilnafsih
NIM : 160802065
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Batu Itam, 18 November 1998
Alamat : Jalan Utama Rukoh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2020
Yang menyatakan



Bilnafsih
BIHUNA BILNAFSIH
NIM. 160802065

**PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DALAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

BIHUNA BILNAFSIH

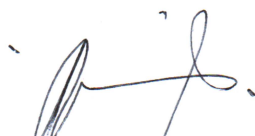
NIM. 160802065


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dra. Tasnim Idris, M.Ag
NIP. 195912181991032002


Cut Zamharira S.IP.,M. AP
NIDN. 2017117904

**PARTISIPASI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DALAM
PEMBANGUNAN KAWASAN PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH**

Skripsi

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:


Bihuna Bilnafsih
NIM: 160802065

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Agustus 2020
09 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

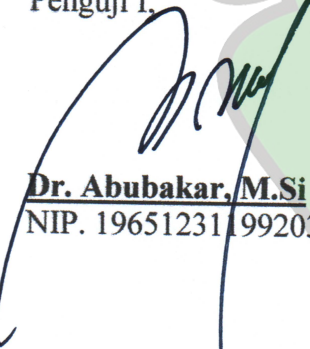
Ketua, I


Dra. Tasnim Idris, M.Aq
NIP. 195912181991032002


Sekretaris, II


Cut Zamharira S.IP., M.AP
NIDN. 20171117904

Penguji I,



Dr. Abubakar, M.Si
NIP. 196512311992031040

Penguji II,


Dr. Dahlawi, M. Si.
NIP. 196201011985031019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan suatu bangsa/negara dalam pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Partisipasi masyarakat merupakan kemauan atau ikut serta masyarakat terhadap rencana pembangunan. Di suatu daerah terdapat masyarakat yang beragam dan memiliki bermacam budaya, agama dan adat istiadat. Begitu juga halnya Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat serta etnis yang beragam dibandingkan dengan daerah lainya di Aceh. Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas terbanyak yang ada di Kota Banda Aceh tepatnya di Peunayong. Etnis Tionghoa adalah etnis keturunan Tiongkok (China), secara garis besar mereka menganut agama Konghuchu, Budha dan Kristen, serta sebagian besar mata pencahariannya sebagai pedagang di kawasan perdagangan Peunayong Kota Banda Aceh. Namun keikutsertaan masyarakat etnis Tionghoa dalam perencanaan pembangun desa dapat kita lihat dari keikutsertaan mereka hanya aktif di kegiatan Posyandu, dan pasif di beberapa program pembangunan lainnya. Penelitian ini menyatakan bagaimana partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan kawasan Peunayong dan apa faktor penyebab partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan kawasan Peunayong. Tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dan apa faktor penyebab partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong tergolong rendah. Penyebab minimnya partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam pembangunan ini karena mereka lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan gampongnya sehingga masyarakat pribumi kurang memberikan perhatian kepada etnis ini khususnya yang memegang wewenang gampong tersebut, seperti kurang memberi tanggung jawab mengenai pembangunan gampong.

Kata kunci: *Partisipasi masyarakat, Etnis Tionghoa, dan Pembangunan*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam Pembangunan Kawasan Peunayong”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Darulkutni (Alm) dan Ibunda Nurmila yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti ananda. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, Delka Alim Darma, Nenek Sulira, Paman Safrizal, Ajok Sofian, Acut Rika Darnila dan Acik Lindawati. penulis lainnya dan juga motivator serta penyemangat yang tak henti-hentinya memberikan semangat yang sangat luar biasa Abang Irfan Suhelmi, S.H.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 3. Eka Januar, M.Soc.,Sc. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak akan dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Ibunda Dr. Tasnim Idrus MA dan Ibunda Cut Zamharira S.IP.,M.AP., Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Terima kasih kepada Penguji 1, Dr. Dahlawi, M.Si dan Penguji II, Dr. Abubakar, M.Si. yang telah menguji dan membimbing jalannya Skripsi.
 7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
 8. Kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
 9. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
 10. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Eling Asjaini, Nola Alfia, Santi Wardani, Soraya Tajul, Riazil Jannah, Desi Lestari, Sarah Ivana, fifi, dan teman-teman leting 2016 Ilmu Administrasi Negara lainnya serta teman-teman Kos Putri Yamin Selatan (Yayang Pratika, Susi dan Upa,) yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka.
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian

yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 1 September 2020
Penulis,

Bihuna Bilnafsih
NIM. 160802065



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Penjelasan Istilah	6
1.6. Metode Penelitian	7
1.7. Jenis Penelitian	7
1.8. Lokasi Penelitian	9
1.9. Sumber Data	10
1.10. Teknik Pengumpulan Data	11
1.11. Teknik Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Penelitian Terdahulu	16
2.2. Landasan Tiori	17
2.2.1. Partisipasi Masyarakat	17
1. Bentuk Partisipasi	22
2. Manfaat Partisipasi Masyarakat	22
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	23
4. Indikator Partisipasi	24
5. Jenis Partisipasi.....	26
2.2.2. Pembangunan	27
2.2.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	30
2.2.4. Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan	32
2.2.5. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	36
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
3.2. Sejarah Kawasan dalam Gampong Peunayong	36

BAB VI DATA DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
4.1.1. Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Kawasan Penayong	58
4.1.2 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Kawasan Penayong	58
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan suatu bangsa/negara dalam pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan beserta hasil-hasil melalui arah kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.¹ Keberhasilan pembangunan nasional secara umum ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya dan juga kesadaran partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan atau tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat, daerah dan desa.² Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan, sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dari pusat hingga daerah, khususnya di tingkat desa. Pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu

¹Wirda Afni, Skripsi . Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm 14

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat itu sendiri merupakan kemauan atau ikut serta masyarakat terhadap rencana pembangunan dan bekerjasama dalam melakukan suatu pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat setempat.³ Di suatu daerah terdapat masyarakat yang beragam dan memiliki bermacam budaya, agama dan adat istiadat. Maka dari itu kita harus menumbuhkan rasa partisipasi kepada diri masyarakat agar ada dukungan dan ingin tau dalam melakukan aktivitas pembangunan.

Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Banda Aceh merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat serta etnis yang beragam dibandingkan dengan daerah lainya di Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 259.931 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/Ha, yang terdiri dari berbagai etnis/suku.⁴ Salah satunya adalah masyarakat etnis Tionghoa. Banda Aceh adalah kota terbesar di Provinsi Aceh yang merupakan kota dengan penduduk mayoritas bersuku/etnis Aceh, bersyariat Islam dan disebut-sebut sebagai model kota Gemilang. Banda Aceh sebagai Kota Gemilang adalah istilah pada masa Walikota Aminullah Usman. Namun ada beberapa etnis minoritas yang sudah sejak lama berdomisili dan menjadi

³ Indah Tri Fitriyanti, Ramadan Setiawan dkk. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang)*. 2017, Universitas Maritim Raja Alli Haji Tanjung Pinang. Hlm 5

⁴ Diakses dari <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html/> pada tanggal 25 April 2020.

penduduk tetap. Etnis Tionghoa merupakan etnis minoritas terbanyak yang ada di Kota Banda Aceh. Etnis Tionghoa adalah etnis keturunan Tiongkok (China), secara garis besar mereka menganut agama Konghuchu, Budha dan Kristen, serta sebagian besar mata pencahariannya sebagai pedagang di kawasan perdagangan Peunayong Kota Banda Aceh.⁵

Seperti juga masyarakat Tionghoa di Indonesia, kebudayaan yang mereka miliki berbeda dengan kebudayaan masyarakat pribumi. Mereka memiliki norma-norma, pandangan, pedoman yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat pribumi. Masyarakat Tionghoa di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua golongan, pertama disebut dengan golongan peranakan, yaitu generasi imigran Cina yang hidup turun-temurun di Indonesia yang sudah tidak lagi condong ke negeri Cina dan telah menganggap Indonesia sebagai bangsa asli mereka. Golongan kedua adalah golongan “Totok” yaitu mereka yang telah hidup turun-temurun pada umumnya masih fanatik menggantungkan loyalitas kepada leluhurnya di negeri Cina.⁶

Budaya masyarakat Tionghoa yang terdapat di Gampong Peunayong tersebut umumnya masih menampilkan perilaku dan budaya nenek moyang mereka, misalnya seperti pakaian, sikap dan kepercayaan. Bahkan mereka sangat terikat dengan Ideologi dan kebudayaan masa lampau, serta taat pada ajaran budaya masing-masing. Bagi etnis Tionghoa, budaya masa lampau merupakan cerminan keberhasilan masa kini, sehingga nilai-nilai budaya masa lampau tersebut masih melekat pada diri

⁵ Risfandy, Jurnal Fisip Unsyiah : *Tingkat Efektivitas Sosialisasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Vol 2, No 3, (Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017), hlm. 4-5.

⁶ Titin Listiyani, Jurnal Komunitas : *Partisipasi Masyarakat Sekitar dalam Ritual di Kelenteng Ban Eng Bio Adiwerna*, Vol.3, No 2, ISSN 2086-5465, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm 125-126.

mereka dan sangat dipertahankan, meskipun bertempat tinggal di salah satu wilayah terutama wilayah Aceh, tepatnya di Gampong Peunayong.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, memberikan peluang bagi etnis Tionghoa untuk dapat memposisikan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia setara dengan etnis-etnis lain. Bagi sebagian masyarakat keturunan Tionghoa, keputusan ini bisa menjadi titik balik yang menentukan kembalinya hak-hak budaya etnis Tionghoa, sehingga perayaan-perayaan agama dan adat istiadat Tionghoa yang dahulu dilarang bisa diekspresikan kembali.⁷

Menurut sejarah hubungan antara Aceh dan China terjalin sejak abad ke -17 M. Saat itu para pedagang dari China silih berganti datang ke Aceh. Mereka berprofesi sebagai pedagang musiman dan juga pedagang permanen. Mereka tinggal di perkampungan China di ujung kota dekat pelabuhan. Kampung yang mereka tempati di Banda Aceh adalah Kampung Mulia, Kampung Laksana dan Peunayong. Di daerah tempat tersebut dihuni beragam pemeluk agama, baik Islam, Nasrani, maupun Budha.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Kantor *Keuchik* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan Bapak Yuspriadi, beliau menyatakan bahwa “Masih minimnya keikutsertaan masyarakat etnis Tionghoa dalam perencanaan pembangun desa. Dalam musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka sudah dipanggil oleh perangkat desa, tetapi yang hadir hanya sedikit. Keikutsertaan mereka hanya terlihat di kegiatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

Posyandu, Pada tahun 2016 ada 2 orang dari etnis Tionghoa yang menjabat sebagai kepala dusun. Tetapi sekarang tidak ada lagi. Kemudian dalam pengurusan surat menyurat etnis Tionghoa tidak mau datang langsung ke Kantor *Keuchik*, mereka hanya mengirim orang untuk menguruskan surat yang mereka perlukan”.⁸ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dibuat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan di kawasan Peunayong?
2. Apa faktor penghambat partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan di kawasan Peunayong?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan di kawasan Peunayong.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan di kawasan Peunayong.

⁸ Wawancara dengan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Kantor *Geuchik Gampong* Peunayong pada Rabu, 08 Januari 2020, pukul 11.20 WIB.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian yang akan di harapkan menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam partisipasi pembangunan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan masyarakat serta ikut aktif dalam proses partisipasi pembangunan.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu kegiatan. Menurut Sumarto dalam Sembodo Partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholder* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberative*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi, dan memulai suatu aksi bersama terjadi.
2. Masyarakat menurut Koenjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu identitas yang sama.⁹
Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Etnis Tionghoa

⁹ Koenjaraningrat dalam Nurma Juwita, Skripsi : *Persepsi Masyarakat Pendatang Terhadap Sikap Bela Negara di Kampung Panaragan Jaya Indah Kabupaten Tulang Bawang Barat*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2016), hlm. 14.

yang merupakan salah satu etnis di Indonesia yang asal leluhurnya berasal dari Tiongkok.

3. Pembangunan adalah suatu seperangkat usaha yang terencana atau terarah yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.¹⁰
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.¹¹ Kawasan merupakan wilayah yang biasanya bersifat fungsional dan kegunaan.¹²
5. Kualitatif deskriptif adalah menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita dan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan di kawasan Peunayong. Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian lapangan, agar data yang diharapkan dapat terkumpul dengan baik.

¹⁰ Dara Ayu Idraswari, *Analisis Dampak Pembangunan Jalan Layang (Flyover) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 2.

¹¹ Pasal 1 Butir 20 UUD No 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang.

¹² Nia K. Pontoh dan iwan setiawan, *Struktur Tata Ruang Kota*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 6.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya.¹³ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (Seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁴

Dengan demikian jelas bahwa metodologi deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menuntut proses yang menjelaskan secara umum objek penelitian. Penjelasan tersebut didapat dari data-data autentik yang kemudian dianalisis dan ditinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik pertanyaan 5W+1H, yaitu *who, what, when, where, why* dan *how* (teknik pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana).

¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosda Karya, 2006), hlm 4.

¹⁴ Narwawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2007) hlm 67.

¹⁵ Moleong, *Loc.Cit.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁶ Menurut sugiyono, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah Kawasan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena menurut observasi awal peneliti bahwa daerah tersebut merupakan pusat perekonomian kota Banda Aceh yang sebagian besar didominasi oleh masyarakat Tionghoa.

1.6.3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁶ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.29.

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Adapun data primer digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 : Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong Peunayong	1 Orang
2	Sekretaris Gampong Peunayong	1 Orang
3	Masyarakat Tionghoa	2 Orang
4	Masyarakat Pribumi	2 Orang
	Jumlah	6 Orang

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya¹⁹. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literature. Seperti bacaan yang memiliki relevan seperti sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan. Data sekunder ini berupa surat-surat yang ada di kantor Keuchik

¹⁸ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Komunikasi Ekonimo dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial*, hlm 132.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 112

Gampong Peunayong yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.²⁰ Pembahasan penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif yaitu: menjelaskan dan menganalisis pokok-pokok persoalan yang sedang berlaku dan menginter prestasikan kondisi-kondisi ril yang sedang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah teknik dalam rancang penelitian sebagai berikut:²¹

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan penelitian secara sistematis, menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan serta rekaman gambar”.²² Secara umum, observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Observasi diperlukan guna untuk mendapat data yang lebih akurat sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam hal ini observasi dapat sangat bermanfaat dalam mengambil bukti seperti halnya foto-foto untuk menambah ke abstrakhan penelitian. Pada umumnya observasi suatu teknik yang bukan pada dasar perencanaan yang tersusun melainkan proses

²⁰ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Aneka Cipta, 2020), hlm 133.

²¹ M. Yatim Abdullah, *pengantar Stui Etika*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 84-88.

²² Sutupo, H. B. (2002). *Metedologi penelitian kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret Universitay Pres hal.64 Diakses 17 Oktober 2018

pengamatan yang terjadi saat turun langsung ke lokasi penelitian di Kawasan Peunayong pada tanggal 20 Juni sampai 23 Juli 2020, waktu yang ditentukan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah partisipasi masyarakat tionghoa dalam pembangunan di Kawasan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Observasi yang dilakukan peneliti biasanya dimulai dari pengambilan data atau hasil wawancara di Gampong Peunayong terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut.²³ Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada Keuchik, sekretaris, masyarakat Tionghoa dan masyarakat non Tionghoa di Kawasan Peunayong.

Dalam teknik wawancara pada Penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik pertanyaan 5W+1H, yaitu who, what, when, where, why dan how (teknik pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana).

Dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis dapat memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.

²³ Yaumi, Muhammad, *Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2016). hlm 101.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk catatan, buku atau karya-karya monumental seseorang.²⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat laporan dalam penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen resmi dari sumber yang akurat yang bertanggungjawab dalam persoalan ini, seperti aparatur kawasan Peunayong Pengurus. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal, berupa catatan peserta yang hadir dalam kegiatan *musyawarah* yang telah ditetapkan pada kader Kawasan dalam *Gampong* Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Juni sampai 23 Juli 2020. Dengan demikian peneliti akan mempermudah dalam penulisan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini tentunya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang bertanggungjawab dalam persoalan ini kemudian barulah dari peneliti mengabadikannya.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁵ Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori dan pengolahan secara rinci melalui:

²⁴ Siyono, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta,: Literasi, Media Publishing, 2015).hlm. 83.

²⁵ Suryana, 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Buku ajaran perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses pada tanggal 3 juli 2020.

a. Reduksi Data (*Reduction Data*).

Reduksi data merupakan pemilihan, penyederhanaan, dan penyeleksian data yang terkait dengan fokus penelitian penulis dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Oleh karena itu, dalam menentukan data yang dapat dipakai dalam penelitian ini, peneliti memilah-milah dan memilih data yang terkumpul dari informan sehingga dapat dijadikan acuan untuk melengkapi hasil penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survei dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Dengan tujuan memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Ada Kalanya, ketika menggunakan teknik wawancara di dalamnya ada pertanyaan terbuka (pertanyaan yang jawabannya diserahkan kepada informan), akan tetapi jumlah pertanyaan tidak banyak dan hanya diperlakukan sebagai pelengkap.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.²⁶ Mulai dari permulaan pengumpulan data, mencatat keteraturan

²⁶ Badratun Nafis, *Analisis Pelaksanaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya*, 2020, hlm 33.

dan penjelasan dari setiap data dan informasi yang di dapatkan saat di lokasi penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi acuan adalah penelitian dari Agung Suharyanto dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah”.²⁷ Hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa telah berpartisipasi aktif dalam Pilkada Kota Binjai dengan secara langsung memberikan suaranya ditempat pemungutan suara (TPS) dengan tingkat kehadiran yang baik. Keikutsertaannya juga sebagai bagian dalam tim sukses dalam dinamika politik dalam pemerintahan.

Penelitian kedua dari Bobby Irwansyah dengan judul penelitian “Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Etnis Tionghoa dalam Pilkada Kota Medan”.²⁸ Hasil penelitiannya mengatakan bahwa tingkat keterlibatan mereka dalam perpolitikan tergolong tinggi khususnya pada pemilihan kepala daerah langsung yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota Medan.

Penelitian ketiga dari Melia Seti Satya, Bunyamin Maftuh dengan judul “strategi masyarakat etnis tionghoa dan melayu Bangka dalam membangun interaksi sosial untuk memperkuat kesatuan bangsa”.²⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwa

²⁷ Agung Suharyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial politik UMA 2 (2) 2014. Diakses pada tgl 08 Januari 2020.

²⁸ Bobby Irwansyah, *Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Etnis tionghoa dalam Pilkada Kota Medan*. Jurnal POLITEIA Vol 2 No 2 Juli 2010. diakses pada tgl 08 Januari 2020 pk1. 14:30.

²⁹ Melia Seti Satya, *Strategi Masyarakat Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka dalam Membangun Interaksi Sosial Untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa*”jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol 25 No 1 juni 2016. Diakses pada tgl 09 januari 2020 pk1.20:05.

interaksi sosial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dan melayu Bangka terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis ingin meneliti bagaimana partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan peunayong kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian sebelumnya melihat dari segi peran politiknya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah peran individu atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.³⁰ Secara umum, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi berarti turut berperan serta pada suatu kegiatan.³¹ Partisipasi merupakan keterlibatan mental (pikiran) dan emosi (perasaan) seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha dalam mencapai tujuan serta tujuan bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan dalam partisipasi masyarakat dapat diukur dengan melihat bagaimana

³⁰ Andi Nurhalimah, 2018. *Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*. Vol 6 No 2.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

keterlibatan masyarakat dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam Al-Qur'an secara garis besar memiliki keadilan, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki keadilan.³² Maka keadilan merupakan suatu prinsip yang mempengaruhi kepada keadilan sosial yang mana pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam Al-Qur'an salah satu ayat yang menjelaskan keadilan terdapat pada Firman Allah SWT pada surat An-Nahl:90, yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S An-Nahl:90).³³

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang paling komprehensif di dalam Alquran, karena di dalamnya digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Begitu juga dalam menjalankan partisipasi dalam pembangunan pemerintahan, terutama dapat melakukan partisipasi masyarakat yang

³² *Good Governance*. Dalam Islam, diakses di <http://jmf.fisip.ugm.ac.id/2017/10/good-governancedalam-islam>. pada tanggal 14 juli 2020.

³³ *Tafsir Web Qur'an Surat An-Nahl ayat 90* diakses di <https://tafsirweb.com/3138-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html> pada 15 Juli 2020.

bersifat adil, dalam menjalankan pemerintahan dan memutuskan kebijakan yang sudah ditetapkan. Begitu juga tingkat partisipasi masyarakat atau kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi dan kebutuhan.

Konsep partisipasi masyarakat juga telah dianjurkan oleh Rasulullah, seperti hadits dibawah ini:

وَعَنْ ابْنِ غَنَمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَوْ اجْتَمَعْنَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْنَاكُمْمَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Ibnu Ghanim: bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (musyawarah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua.” (HR Ahmad).³⁴

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bermusyawarah dalam menentukan sebuah keputusan. Dan apabila mereka telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut, maka Rasulullah tidak akan menentang hasil musyawarah itu, karena telah berdasarkan hasil perundingan bersama yang dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Maka hal tersebut juga seharusnya diterapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan antar masyarakat, tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan keinginan pemimpin saja, maka harus ada partisipasi antar masyarakat nya. Dari tingkat yang paling kecil yaitu tingkat desa, melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Dengan dilakukannya musyawarah, maka berarti masyarakat turut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

³⁴ Majmauz Zawaid jilid 9 halaman 53 hadis nomor 2696 diakses di http://carihadis.com/Majmauz_Zawaid/2696 pada tanggal 15 Juli 2020.

Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam masyarakat desa keadaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila asas swadaya dan gotong-royong dilaksanakan secara massal dan menyeluruh dalam satu pola tertentu menggambarkan pencerminan kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu-individu yang mendukungnya.³⁵ Maka proses pembangunan adalah milik bersama yang harus dipelihara dan di pertanggung jawabkan demi kesejahteraan bersama.

Partisipasi secara harfiah berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, bisa juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau peran yang dilakukan dalam suatu kegiatan, peran itu bisa bersifat aktif atau tidak aktif. Partisipasi dapat juga diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.³⁶ Namun dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah rangkaian keikutsertaan, peran dan kerjasama masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama dalam proses-proses pembangunan yang kemudian akan menikmati hasilnya secara bersama-sama.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai objek dan subjek pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pembangunan

³⁵ *Ibid.*, Hlm 55-56.

³⁶ Tauchid Noor, *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.1, 2009, hal. 59

dimulai sejak tahap perencanaan sampai pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawab.³⁷ Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian kelompok. Mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Maka dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.

1. Bentuk Partisipasi

Ericson membagikan tiga tahap bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan yaitu *Ideal planning stage*, *Implementation stage*, *Utilitazion stage*.³⁸ Yang dimaksud dengan *ideal planning stage* ialah keikutsertaan seseorang dalam pembangunan dan memberikan rencana atau strategi dalam penyusunan kepanitiann dan anggaran pada suatu proyek. Sedangkan *implementation stage* ialah suatu keikutsertaan seseorang masyarakat tersebut memberikan tenaga atau gagasan dalam suatu pekerjaan. Dan *Utilitazion stage* adalah keikutsertaan seseorang dalam pemanfaatan suatu program setelah program tersebut selesai dikerjakan.

Menurut Gavena Valderama, Arsito dan Wahyuddin, mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu: *political participation*, *social participation*, *citizen participation/citizenship*.³⁹ Yang dimaksud dengan *political participation* adalah

³⁷ Indah Tri Fitriyanti dan ramadhani setiawan,dkk. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*, Skripsi, universitas Maritim Raja Ali Haji 2017. hlm 7-8.

³⁸ Sanjaya, Roy Topan. 2013, *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan*. Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utama. hlm 125.

³⁹ Wahyuddin, Skripsi: *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018. hlm 25.

suatu konsep bahwa lebih dominan pada pengaruh kedudukan wakil-wakil rakyat. Sedangkan *social participation* adalah suatu kegiatan pembangun masyarakat yang dilakukan secara sosialisasi dan dilakukan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Selanjutnya *citizen participation/citizenship* adalah partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemimpinan. Maka partisipasi dalam penelitian adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan pembangunan, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dan partisipasi dalam konsep ini lebih dominan pada *social participation*.

2. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westra antara lain: (1) Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar; (2) Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat; (3) Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*human dignity*), dorongan (motivasi) serta membantu kepentingan bersama; (4) Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab; (5) Memperbaiki semangat bekerjasama serta menimbulkan kesatuan kerja (6) Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.⁴⁰ Dengan adanya partisipasi maka ada suatu kemampuan berfikir dan kreatif dan dapat membantu kepentingan bersama termasuk nilai-nilai martabat manusia. Dalam melakukan partisipasi pembangunan maka kita lebih mendorongnya untuk bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Bahwasanya melakukan pekerjaan dapat membangun kerjasama dalam suatu kesatuan. Dalam

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 13.

hasil partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat melakukan perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan menurut Huraerah, antara lain⁴¹:

1. Partisipasi Buah Pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi Tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi Harta Benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi Sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban

4. Indikator Partisipasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi dalam pembangunan penelitian ini adalah 3 prinsip partisipasi yang tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) meliputi: Kesetaraan, Transparansi, Pemberdayaan dan Kerjasama.⁴²

Berdasarkan indikator partisipasi di atas antara lain, kesetaraan merupakan suatu keterampilan, kemauan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan proses guna pembangunan tanpa memperhitungkan jenjang dalam suatu pihak. Sedangkan Transparansi adalah keharusan semua pihak menumbuh kembangkan

⁴¹ Septyasa, Nuring L. 2013. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 1, No 1, Januari 2013. Hal 61.

⁴² Monique Sumampouw dalam Desi Usmaniya, Skripsi: *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukkut Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2013*, (Tanjungpinang : Universitas Maritim Raja Ali Hajji 2014) hlm 21-22.

komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Namun Pemberdayaan merupakan suatu keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan dan saling memberdayakan satu sama lain. Dan kerjasama merupakan suatu pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang bentuk Republik”, Ayat (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.⁴³ Dijelaskan bahwasanya rakyat memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya, jadi pemerintah didalam negara indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting.

Tingkat pelibatan masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya terbagi dalam 8 (delapan) tingkatan, dari yang bersifat non-partisipasi sampai pada kekuasaan warga. Tingkatan tersebut sebagai berikut: Manipulasi, terapi, konsultasi, penentruman, kemitraan dan masyarakat atau yang mengontrol.⁴⁴ Yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari tahap yang paling dasar, yaitu dari tingkat musyawarah bersama di tingkat desa. Masyarakat

⁴³ UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) & (2)..

⁴⁴ Sigalingging, Angelius Henry, dkk. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*. 2014 Jurnal Administrasi Publik, Vol 2 No 2, ISSN: 2088-527x. Hlm 126

memberikan usulan dalam pembangunan. Maka tingkat kekuasaan bisa disalurkan kepada masyarakat berdasarkan peran penting dalam suatu program.

Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam pembangunan adalah masyarakat yang memegang peran penting dalam melakukan suatu program untuk memberi usulan dan masukan berupa jaminan dan ide dalam memproses suatu program mencapai tujuan bersama, dan melakukan partisipasi dalam menggerakkan pembangunan tersebut.

5. Jenis Partisipasi

Adapun jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi: adanya inisiatif, pembiayaan, pengambilan keputusan, mobilisasi tenaga dan pelaksanaan pembangunan.⁴⁵ yaitu:

- a. Prakarsa/inisiatif merupakan suatu bentuk partisipasi untuk meningkatkan prakarsa masyarakat, menyarankan strategis pemberdayaan terus menerus, terarah dan terencana dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan prakarsanya.
- b. Pembiayaan merupakan suatu bentuk partisipasi untuk meningkatkan pembiayaan masyarakat, strategi yang disarankan adalah untuk mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah.
- c. Pengambilan keputusan merupakan suatu bentuk partisipasi untuk meningkatkan pembuatan keputusan oleh masyarakat, strategi yang disarankan adalah memperkuat posisi modal yang ada di masyarakat dan juga menekankan pada fasilitator untuk terus menerus mengingatkan masyarakat akan pentingnya peranan mereka dalam membuat keputusan.
- d. Pelaksanaan pembangunan merupakan suatu bentuk partisipasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan

⁴⁵ Vivi Herlina, 2017. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisikdi Desa Pungu Hilir, Kabupaten Kerinci. Jurnal IPTEKS Terdapat. ISSN : 1979-9292. Hlm :229. Diakses pada tgl 29 Agustus 2020, pkl 20:00

pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dipandu dalam kegiatan pembangunan ni.

- e. Mobilisasi tenaga merupakan suatu bentuk partisipasi dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan sebagai saran untuk memobilisasi tenaga.

Faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat meliputi: Adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan.⁴⁶ Dalam melakukan partisipasi pembangunan yang paling penting adanya kemauan dari diri sendiri. maka dalam melakukan pembangunan disuatu kawasan harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kegiatan partisipasi yang dilakukan. berdasar kesempatan baik itu waktu, tenaga yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Faktor Penghambat partisipasi masyarakat juga dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁴⁷ Maka faktor internal adalah kemauan dari masyarakat itu sendiri, artinya proses partisipasi dapat terhambat jika tidak ada inisiatif dari diri sendiri untuk ikut serta dalam proses-proses pembangunan. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Faktor penghambat ini, berasal dari luar, pengaruh lingkungan atau kebiasaan masyarakat yang memang tidak terbiasa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Budaya dalam masyarakat biasanya melekat kuat oleh karenanya jika pun seseorang memiliki inisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan, namun tidak didukung oleh keadaan masyarakat dan budaya yang dianut, maka partisipasi pun akan terhambat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat

⁴⁶ Dea Deviyanti, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. Jurnal 2013, Administrasi Negara, fisip,-unmul. Vol 1 No 2, ISSN 0000-0000 Hlm 383-384.

⁴⁷ Hadi, Abdul.2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan* , di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Geresik. Vol 17, No. 1 ISSN 1411-0199 Hlm 13.

disimpulkan bahwa dalam partisipasi memiliki faktor penghambat baik itu internal maupun eksternal.

2.2.2. Pembangunan

Pembangunan merupakan pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan dan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan.⁴⁸ Maka pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu kawasan.

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini. Siagian, memberikan definisi sebagai berikut: “Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”⁴⁹ Namun pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi terus menerus dalam kemajuan yang ingin dicapai.

Menurut Bintu Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan keseimbangan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju

48 Syukur Kholil, 2017, Peran Komunikasi Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat (bpm) Dalam Pembangunan Sosial dan Keagamaan. UIN Sumatera Utara. Vol. 1. No 2, hlm 291.

49 Wahyuddin (2018). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰ Maka pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan masyarakat secara sengaja dan membangun suatu pembangunan dalam kawasan menjadi lebih baik dalam keseimbangan pelaksanaan yang adil dan makmur. Pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut. Bagaimana mungkin membangun suatu gedung yang tinggi dan megah kalau fondasinya lemah.

Perencanaan pembangunan adalah proses perencanaan ditentukan dalam suatu tujuan dan prioritas serta program-program pembangunan, dengan ketersediaan sumber data yang terbatas. Mekanisme atau kelembagaan dalam perencanaan pembangunan sangat menentukan bagaimana para pemangku kepentingan menentukan arah pembangunan, termasuk penggunaan sumber daya yang ada, dalam suatu perencanaan pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat.⁵¹ Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ialah suatu cara menentukan program-program yang ingin di capai dan memiliki suatu tujuan yang sama dalam melakukan rencana pembangunan yang bertujuan dalam suatu masyarakat.

Pembangunan suatu wilayah harus dimulai dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut. Bagaimana mungkin membangun suatu gedung yang tinggi dan megah kalau fondasinya lemah. Betapa pentingnya menuntut ilmu dalam Islam, Bahkan ketika sedang kondisi peperangan, sebagian kaum muslimin dianjurkan untuk tidak ikut berjihad dan tetap fokus dalam pendidikan.

Sebagaimana Fiman Allah dalam Al-Quran Surat AT-Taubah:122.

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 26-27.

⁵¹ Ahmad Helmy Fuady. Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pascaerde Baru. Jurnal Lembaga Pengetahuan Indonesia 2012 Vol 38 No 2 Hlm 378.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢)

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya (QS. At-Taubah:122).⁵²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ilmu itu sangat penting, bahkan dalam situasi genting seperti dalam peperangan. Dalam ayat ini juga diajarkan keadilan, artinya tidak semua orang harus pergi berperang, melainkan harus ada sebagian yang tinggal untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik, serta menjadikan pendidikan sebagai modal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

2.2.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa tugas pokok bangsa adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis dilaksanakan serta bertahap dan berkesinambungan. Dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka

⁵² Tafsir web Qur'an Surat At-Taubah Ayat 122 diakses di <https://tafsirweb.com/3138-quran-surat-at-taubah-ayat-122.html> pada 15 Juli 2020

mencapai tujuan bernegara.⁵³ Pembangunan nasional ini memerlukan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), rencana pembangunan tahunan nasional (RKP), tahunan daerah (RKPD), dan rencana pembangunan tahunan desa atau disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Setiap pengusunan rencana-rencana tersebut di perlukan suatu persiapan rancangan awal rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) dari tingkat desa, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat desa yang setara dan mampu memberikan aspirasinya secara merdeka.

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberdayakan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.⁵⁴ Dalam penelitian ini Kawasan yang dimaksud adalah Kawasan Peunayong.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencanaan. Tinggi rendahnya partisipasi rakyat diukur dengan kemauan rakyat dengan ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.⁵⁵ Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah bentuk dari dukungan masyarakat terhadap suatu pembangunan yang telah disiapkan

⁵³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

⁵⁴ Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trsmigasi* Nomor 5 tahun 2016 tentang *Pembangunan Kawasan Perdesaan*.

⁵⁵ Vivi Herlina, 2007. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci*. Jurnal IPTEKS Terapkan. ISSN : 1979-9292. Hlm : 221. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2020, pkl 21:00.

dan akan dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Karena untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka. Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan.

2.2.4. Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan

Etnis Tionghoa merupakan etnis yang berasal dari Tiongkok yang menetap dan menjadi warga Indonesia. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang memiliki ciri khas sangat kuat dan dapat langsung dikenali dari bahasa, budaya dan ciri fisik yang sangat signifikan. Generasi pertama etnis tionghoa berasal dari pelabuhan Xianmen Provindi Fujian yang berlayar menuju Singapura dan Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selang beberapa tahu mereka berhasil melakukan pembangunan dan perubahan, diantaranya mereka berhasil menjadi pengusaha dan banker ternama di Indonesia.⁵⁶ Yang dimaksud dengan etnis Tionghoa merupakan suatu masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri untuk hidup, dan berpindah tempat dari kota ke kota lain untuk dapat berinteraksi dalam berdagang dan dalam melakukan pembangunan dan perubahan untuk diri mereka. Provinsi Aceh sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki

⁵⁶ Indah tri fitriyanti, ramadhani setiawan, dkk, 2017. *Analisis tingkat partisipasi masyarakat etnis tionghoa dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)*. Sepkripsi, universitas maritin raja ali haji. Hlm 4

kelompok masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari masyarakatnya.⁵⁷ Jumlah penduduk Tionghoa di provinsi Aceh berjumlah 9620 orang atau 0,33 % dari jumlah penduduk Aceh.⁵⁸ Di Kota Banda Aceh penduduk Tionghoa berjumlah sekitar 1000 KK atau ±4000 orang Tionghoa yang sebagian besar berada di kawasan Peunayong Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Peneliti memilih Gampong Peunayong Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian.⁵⁹

Dalam suatu partisipasi memiliki kesetaraan yang mana suatu komunitas harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang akan dipikul oleh setiap orang tanpa mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat:13 Allah SWT yang berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفَ إِنَّ أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Al-Qur'an Surat Al-Hujurat:13).*⁶⁰

Penjelasan ayat di atas menyatakan, dalam proses-proses pembangunan, partisipasi setiap orang sangat dibutuhkan, tanpa memandang agama, suku dan ras nya. Begitu pula dalam pembangunan kawasan Peunayong yang merupakan kawasan

⁵⁷ Bahry, Mawardi, Rajali, & Wildan, 2010

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, 2010

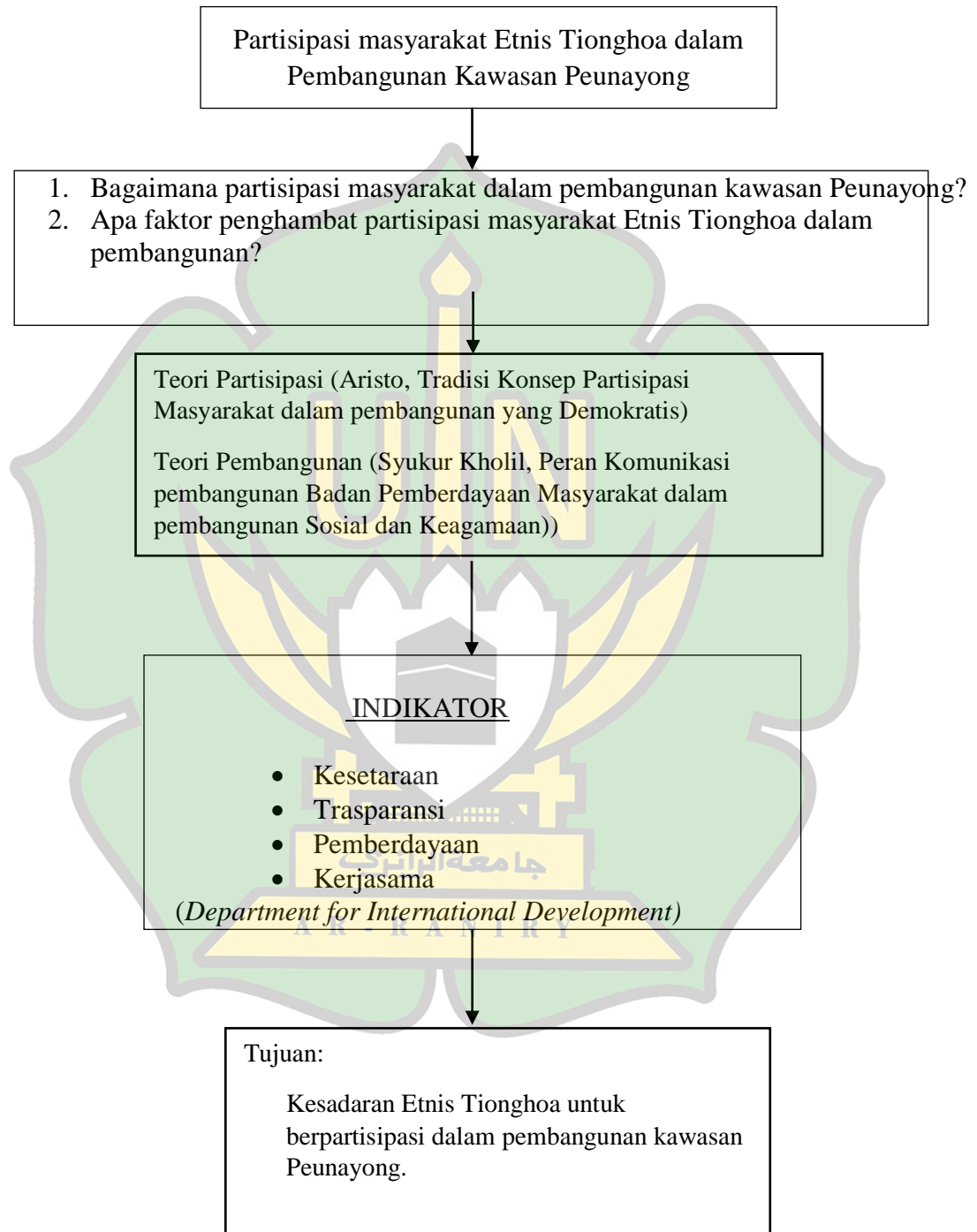
⁵⁹ Ikhdia Novita Putri dan Dahlia. *Kecerdasan Emosional Dan Penyesuaian Sosial Pada Remaja Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh*. Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah, Prodi Psikologi

⁶⁰ Opini, Syiar dan dilabeli Al-Qur'an, amanah, islam, keadilan, pemerintah, tanggung jawab, transparansi. Markahi permalink.

perekonomian di kota Banda Aceh, maka dalam mewujudkan proses pembangunan dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan masyarakat, perlu partisipasi seluruh komponen masyarakat yang menetap di kawasan tersebut termasuk pula etnis Tionghoa di kawasan tersebut.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting guna menciptakan pembangunan-pembangunan yang efektif, efisien dan berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong Kota Banda Aceh, melihat di kawasan Peunayong sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat etnis Tionghoa, keberadaan mereka juga perlu diakui dan diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya, oleh karenanya partisipasi masyarakat etnis Tionghoa sebagai masyarakat tetap di kawasan Peunayong perlu diikutsertakan, melihat betapa pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dan akan dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya tercapailah tujuan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat.

2.2.5. Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Kawasan *Gampong* Peunayong

Peunayong merupakan salah satu pusat perdagangan di Kota Banda Aceh. Menurut catatan sejarah Aceh, nama Peunayong berasal dari Bahasa Cina yang artinya memayungi atau yang berarti tempat berteduh, karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini *Gampong* Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjulukikata *Peumayong* menjadi *Peunayong*, hal ini disebabkan kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah menyebutnya *Peunayong*. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Peunayong adalah kota tertua di Banda Aceh. Belanda mendisain peunayong sebagai *chinezzen kamp (tenda) aau pecinan*. Peunayong dihuni warga china dari suku khae, tyo chiu, kong hu, hokkian, dan sub etnis lainnya. Mata pencarian utama suku-suku cina ini adalah berdagang. Pada masa sultan iskandar tsani, ibu kota kerajaan di bangun taman ghairah, satu taman tempat bercengkerama warga sultan, di taman ini, juga dibangun balai cina sehingga pada abad ke-17 orang-orang cina di banda aceh banyak berperan dalam perdagangan. mereka membangun rumah yang berdekatan satu sama lainnya di salah satu ujung kota dekat laut dan daerah itu dinamakan kampong cina. Para pedagang cina selain ada yang tinggal dan

berdagang secara permanen ada juga pedangan musiman. Pedangan tersebut datang dengan kapal layar. Kapal-kapal china membawa beras ke Aceh dan tinggal dalam di kampong cina, diujung kota dekat pelabuhan. Mereka menurunkan barangnya di pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan. Lokasi tempat menurunkan tersebut kini dikenal *Gampong* Peunayong.

Wilayah *Gampong* Peunayong tempo dulu sampai ke *Gampong* Lampulo yang dulunya disebut Ujong Peunayong. *Gampong* Peunayong telah dimekarkan menjadi 5 (lima) *gampong* administratif yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam diantaranya adalah *Gampong* Mulia, *Gampong* Lampulo, *Gampong* Lam Dingin, *Gampong* Laksana dan *Gampong* Keuramat. Sejak dulu Peunayong memang telah menjadi daerah internasional. Pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda daerah ini dijadikan sebagai kota “spesial”. Julukan spesial karena Sultan memberikan rasa aman kepada para tamu yang datang ke daerah ini, bahkan tak jarang Sultan juga menjamu para tamu kerajaan yang datang dari Eropa maupun Tiongkok.

Hubungan Aceh dan Tiongkok semakin kuat ketika Laksamana Cheng Ho melakukan kunjungan ke Kerajaan Samudera Pasai di Utara Aceh pada tahun 1415. Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam disambut baik bagaikan keluarga. Bahkan bukti kedekatan tersebut hingga saat ini masih ada bukti sebuah lonceng yang berada di Komplek Museum Aceh yang dikenal dengan Lonceng Cakradonya. Tidak hanya pada saat zaman kesultanan saja, tetapi keberadaan Peunayong tetap dipertahankan sampai pada zaman penjajahan Belanda, dimana daerah ini sengaja di

desain dan dibangun dengan konsep kampung pecinan yang sampai saat ini masih terlihat sejumlah bangunan peninggalan tempo dulu sebagai saksi bisu kemegahan Aceh pada masa lampau.

Pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami menyapu daratan Aceh, Peunayong termasuk salah satu daerah yang tersapu gelombang yang maha dahsyat tersebut. Kawasan ini lumpuh total, puing-puing bekas bangunan berserakan. Mayat bergelimpangan. Peunayong berubah menjadi kota mati. Para penghuninya memilih mengungsi ke propinsi tetangga, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Namun kini kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat. Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini.

Khususnya di Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam adalah wilayah terbanyak masyarakat non muslim khususnya etnis Tionghoa yang berdomisili dan menetapkan di sana. Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam, menerapkan salah satu pusat perdagangan di Kota Banda Aceh. Menurut catatan sejarah Aceh, nama Peunayong berasal kata “Peunayong” yang artinya tempat berteduh. Karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata “Peunayong” menjadi “Peunayong”. Hal ini disebabkan oleh kesalahn dalam pengejaan kata oleh sebagian

besar masyarakat sehingga lebih mudah menyebutkannya “Peunayong”. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Peunayong adalah wilayah kota tertua di Banda Aceh. Didesain oleh Belanda sebagai Chinezen Kamp (tenda) atau Pecinaan. Peunayong dihuni warga Cina dari Suku Khe, Tio Chiu, Kong Hu, Hokkian dan sub-etnis lainnya. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut, cukup menonjol. Karena berdagang merupakan mata pencaharian utama suku Cina, yang umumnya tumbuh di lingkungan pusat bisnis.

Pada masa Sultan Iskandar Tsani, Ibukota kerajaan dibangun Taman Ghairah, satu taman tempat bercengkerama keluarga sultan. Di taman itu juga dibangun balai Cina, yang dibuat para pekerjaan Cina. Berulah pada abad ke-17, orang-orang Cina di Banda Aceh banyak berperan dalam perdagangan. Mereka, menempati rumah yang berdekatan satu sama lainnya di salah satu ujung kota di dekat laut dan daerah mereka itu saat ini dinamakan Kampung Cina.

Vihara Dharma Bhakti yang terletak di jalan T Panglima Polen menjadi saksi keberadaan etnis Cina di Aceh. Vihara tersebut dibangun pada tahun 1937. Mulanya Vihara itu terletak di pinggir pantai Ulee Lheue. Akibat erosi, Vihara itu lalu dipindahkan ke tempat sekarang bersamaan dengan kota Banda Aceh yang dulunya juga berada di Ulee Lheue. Menurut catatan sejarah, para pedagang termasuk pedagang dari Cina. Selain ada yang tinggal dan berdagang secara permanen di IbuKota Aceh, ada juga pedagang musiman. Pedagang itu datang dengan kapal layar,

mereka menurunkan barangnya di pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan. Lokasi tempat menurunkan barang tersebut kini dikenal sebagai Peunayong.

Selain aktivitas perdagangan juga terdapat aktivitas keagamaan, ini Nampak dari keberadaan sebuah wihara di antara deretan rumah dan toko modern yang berada di Jl. T Panglima Polem, Peunayong. Sepanjang pagi hari, kawasan Peunayong tak ubahnya seperti kawasan Glodok di Jakarta, atau Petaling Jaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Pedagang Cina dan warga asli Aceh berbaur dengan pengunjung pasar yang didominasi warga Cina. Suasana kedai kopi pun tampak dipenuhi generasi tua masyarakat Cina yang mengenakan kaus sederhana, menikmati kopi, menghisap rokok, sambil bercakap dalam dialek *Khe* diselingi ucapan bahasa Mandarin.

Menurut Kohl dalam Mahmud, khusus pasar di Peunayong, di sepanjang jalan tampak kekhasan bentuk fisik bangunan hunian dua lantai, lantai bawah digunakan untuk berdagang, sedangkan lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal. Bentuk arsitektur ruko lazim ditemukan pada kawasan pecinaan di Asia Tenggara, terutama Singapura dan Malaysia.

Pada kawasan pecinaan di Indonesia, rukoh berarsitektur Cina dapat dikenali dari ciri: bangunan berlantai dua atau lebih dengan atapa yang melengkung dan bertipe pelan (gable roof). Lantai biasanya terbuat dari tegal dengan berbagai ukuran dan dinding tersusun dari bata warna merah yang diplester dengan adukan semen, kapur dan pasir. Tampak depan ruko berisi dekorasi dari pecahan keramik, antara lain bermotif awan menggulung dan naga. Beberapa diantaranya sudah menggunakan pintu yang berbentuk lengkung semu-circular yang bagian atasnya

terbuat dari bata yang disusun secara vertikal mengikuti bentuk lengkungan. Bentuk lengkungan tersebut diakhiri bentuk pelipit.

Pintu dan jendela biasanya terbuat dari susunan bilah papan yang dihubungkan dengan dua engsel (filding shutter). Unit bangunan lain yang menjadi ciri khas kawasan pecinaan adalah wihana, Rukoh biasanya dirancang dalam satu blok bangunan, sedangkan wihara ditempatkan tersendiri, di ujung maupun di bagian tangan rukoh secara terpisah.

Pasar Peunayong merupakan salah satu pasar utama kebutuhan primer warga Banda Aceh. Secara administratif pasar ini masuk dalam kelurahan Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dari masjid Baiturrahman berjarak sekitar 2 km ke arah utara. Secara geografis keletakannya cukup strategis karena berada tidak jauh dari tepi Krueng (sungai) Aceh di sebelah barat dan sekitar 4 kilometer ke arah utaranya berbatasan dengan laut (Selat Malaka). Dulu kawasan ini disebut Bandar Peunayong dan leluhur warga etnis Cina sudah berada di Peunayong sekitar abad 17 M. deretan rukoh lama dan sebuah wihara adalah saksi bisu dari perjalanan sejarah pasar ini yang sebagian masih kokoh berdiri setelah peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 melanda kawasan itu.

Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh sama dengan etnis Tionghoa lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa pada umumnya suku bekerja keras, rajin dan hemat sehingga mereka cepat berhasil dan berkembang di Aceh saat ini berkonsentrasi di Kecamatan Kuta Alam dan Baiturrahman. Etnis Tionghoa di Banda Aceh hidup

berkelompok dan dalam kegiatan keseharian sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat pribumi sehingga masyarakat Tionghoa di Aceh terkesan tertutup dengan masyarakat pribumi. Namun tinggal di daerah Aceh yang notabene menerapkan syariat Islam juga tidak membuat warga etnis Tionghoa tertekan, justru etnis Tionghoa mengakui bahwa hidup di Serambi Mekkah sangat nyaman dan damai dengan saling menjaga kerukunan solid antar umat beragam.

1. Keadaan Geografis.

Gampong Peunayong adalah salah satu dari 11 (sebelas) *gampong* yang ada dalam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang secara Geografis letak *Gampong* Peunayong berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan *Gampong* Mulia.
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Krueng Aceh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan *Gampong* Laksana.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh

Tabel 3.1 Peta Wilayah

Ketinggian Tanah dari permukaan laut	:	0 Mdpl
Curah Hujan	:	0 Mm/tahun
Topografi	:	Dataran Rendah
Suhu udara rata-rata	:	1. C
Jarak dari pusat Kecamatan	:	2 Km
Jarak dari Ibukota Kabupaten	:	1 Km
Jarak dari Ibukota Provinsi	:	3 Km
Jarak dari Ibukota Negara	:	-Km

Sumber: Peta Wilayah 2020.

Tabel 3.2 Peta Wilayah Batang Jurong

A.	Luas Wilayah	:	36.3 Ha	
B.	Berdasarkan Penggunaan	:		
	1. Industri	:	– Ha	
	2. Pertokoan / Perdagangan	:	– Ha	
	3. Perkantoran	:	– Ha	
	4. Pasar Gampong	:	–	
	5. Tanah Wakaf	:	–	
	6. Tanah Sawah	:	a. Irigasi teknis	:–
			b. Irigasi setengah teknis	:– Ha
			c. Irigasi sederhana	:–
			d. Irigasi tadah hujan	:–
			e. Sawah pasang surut	:–
	7. Tanah Kering	:	a. Pekarangan	:– Ha
			b. Perladangan	:–
			c. Tegalan	:–
			e. Perkebunan swasta	:–
			f. Perkebunan rakyat	:–
			g. Tempat rekreasi	:–
C.	Berdasarkan Peruntukan	:		
	1. Jalan	:	– Ha	
	2. Sawah dan lading	:	– Ha	
	3. Bangunan umum	:	–	
	4. Empang	:	–	
	5. Pemukiman / Perumahan	:	– Ha	

6. Jalur hijau	:	–	
7. Pekuburan	:	– Ha	
8. Lain-lain (sungai dan parit)	:	– Ha	

Sumber: Peta Wilayah Batas Jurong 2020.

Tabel: 3.3. Populasi Per Wilayah

No	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Laki-Laki	Perempuan
1	MERPATI	0	346	1185	611	574
2	GARUDA	0	143	489	248	241
3	CENDRAWASIH	0	132	420	205	214
4	GAJAH PUTIH	0	97	275	139	136
	Total	0	718	2369	1203	1165

Sumber: Populasi Per Wilayah 2020.

2. Jumlah Penduduk Etnis Tionghoa dan Non Tionghoa.

Jumlah penduduk *gampong* Peunayong berjumlah: 2.369 jiwa, terdiri dari 963 jiwa beragama Islam, 223 jiwa beragama Kristen, 129 jiwa beragama Khatolik, dan 1029 jiwa beragama Budha. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada table 3.4 sebagai berikut:

Tabel: 3.4. Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	ISLAM	963	494	468
2	KRISTEN	223	101	122
3	KATHOLIK	129	65	64
5	BUDHA	1029	528	501
	Jumlah	2344	1188	1155
	Belum Mengisi	25	15	10
	Total	2369	1203	1165

Sumber: Pendudukan Menurut Agama (2020).

Dari tabel tersebut, jika di bandingkan penduduk islam dan non muslim terlihat jelas bahwa di Kecamatan Kuta Alam khususnya gampong Peunayong secara umum didominasi oleh masyarakat non muslim.

Tabel: 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jumlah Kelamin	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Laki-Laki	1203	1203	0
2	Perempuan	1165	0	1165
	Jumlah	2368	1203	1165
	Belim Mengisi	1	0	0
	Total	2369	1203	1165

Sember: Jumlah Pendudukan Menurut Jenis Kelamin (2020).

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Kawasan Peunayong sebanyak 1.203 jiwa sementara perempuan sebanyak 1.165 jiwa, sementara itu, untuk melihat jenis pekerjaan masyarakat Etnis Tionghoa dan Non Tionghoa dapat di amati secara keseluruhannya sebagai berikut:

Tabel: 3.6. Kependudukan menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum/Tidak Bekerja	591	291	300
2	Mengurus Rumah Tangga	486	1	484
3	Pelajar/Mahasiswa	419	236	183
4	Pensiun	5	2	3
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13	8	5
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	2	1	1
7	Kepolisian RI (POLRI)	5	5	0

8	Perdagangan	19	14	5
9	Petani/Pekebun	1	0	1
11	Nelayan/Perikanan	3	3	0
12	Industri	1	1	0
15	Karyawan Swasta	83	0	25
16	Karyawan BUMN	1	58	1
17	Karyawan BUMD	1	0	0
18	Karyawan Honorer	7	1	5
19	Buruh Harian Lepas	5	2	1
20	Buruh Tani/Perkebunan	1	4	0
21	Buruh Nelayan/Perikanan	0	1	0
23	Pembantu Rumah Tangga	1	0	1
24	Tukang Cukur	2	0	0
25	Tukang Listrik	0	2	0
26	Tukang Batu	1	0	0
27	Tukang Kayu	0	1	0
30	Tukang Jahit	2	0	1
31	Tukang Gigi	3	1	0
32	Penata Rias	0	3	0
34	Penata Rambut	1	0	0
35	Mekanik	8	1	0
36	Seniman	1	8	0
37	Tabib	0	1	0
39	Perancang Busana	1	0	1
42	Pendeta	1	0	0
43	Pastor	1	1	0
44	Wartawan	0	1	0
64	Dosen	4	2	2
65	Guru	8	3	5
68	Notaris	1	1	0
72	Dokter	3	1	2
73	Bidan	2	0	2
74	Perawat	4	0	4
75	Apoteker	1	0	1
79	Pelaut	1	1	0
81	Sopir	3	3	0
84	Pedagang	35	28	7
87	Biarawati	1	0	1
88	Wiraswasta	602	494	108
	Jumlah	2330	1180	1149
	Belum Nikah	39	23	16
	Total	2369	1203	1165

Sumber: Kependudukan Menurut Pekerjaan 2020.

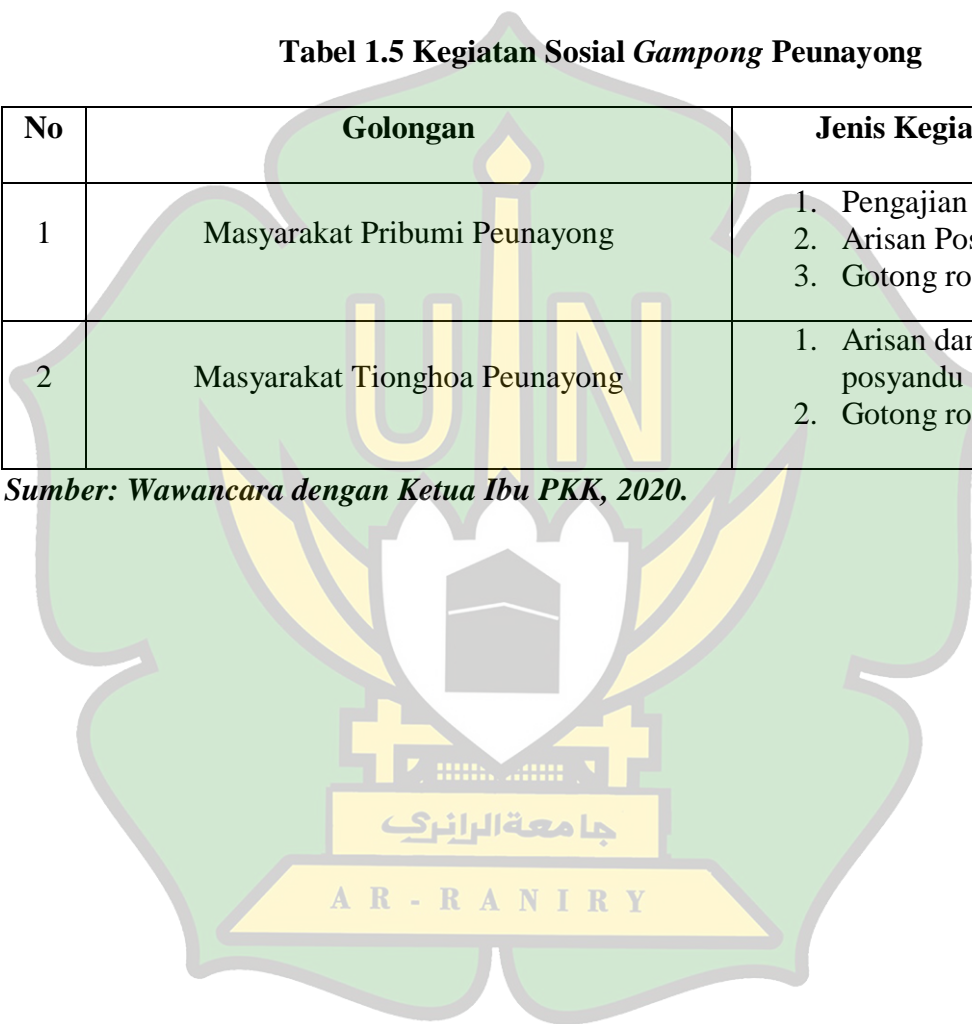
3. Kegiatan Sosial Masyarakat *Gampong* Peunayong

Berikut beberapa kegiatan dalam kehidupan sosial yang dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat *Gampong* Peunayong.

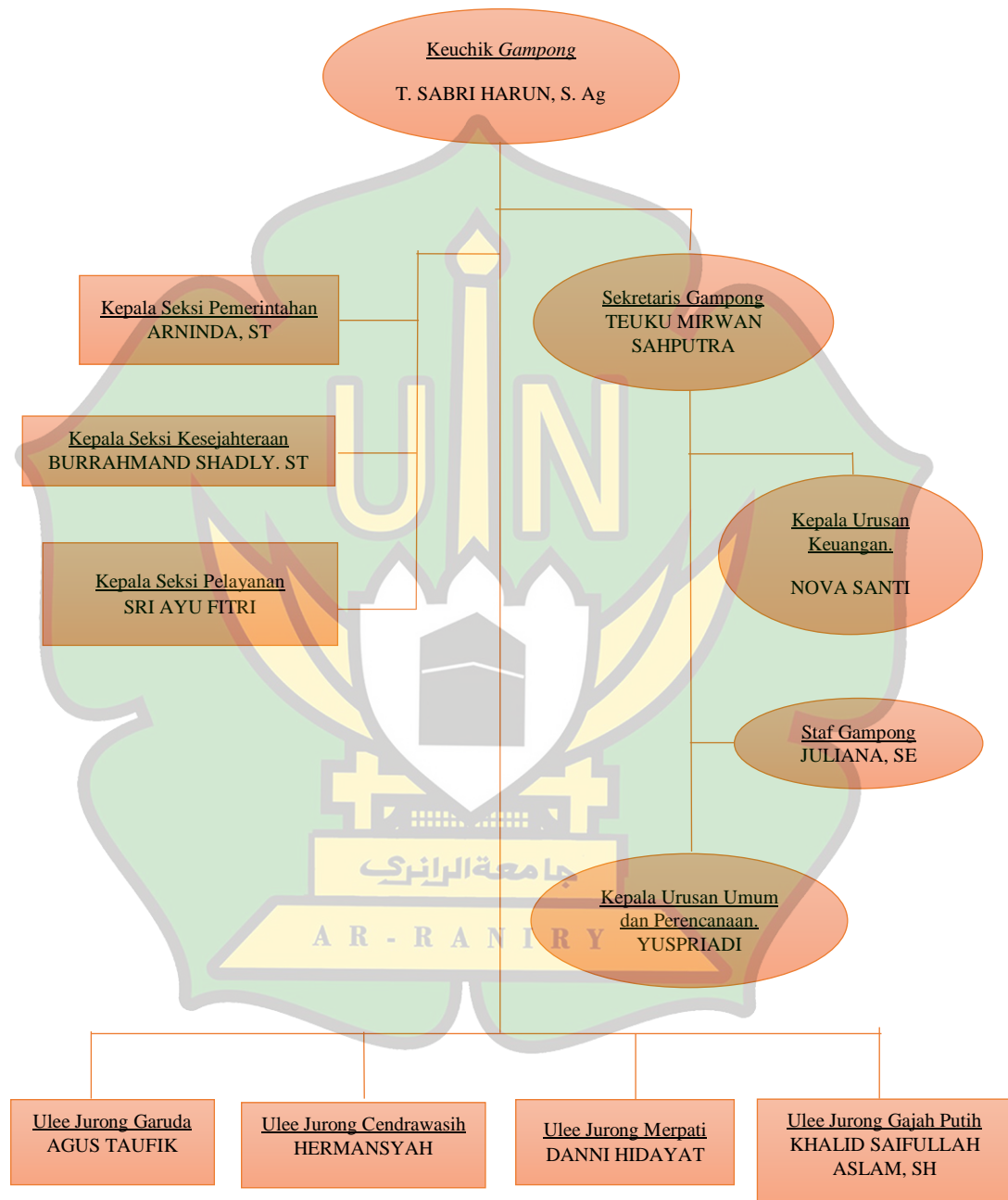
Tabel 1.5 Kegiatan Sosial *Gampong* Peunayong

No	Golongan	Jenis Kegiatan
1	Masyarakat Pribumi Peunayong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajian 2. Arisan Posyandu 3. Gotong royong
2	Masyarakat Tionghoa Peunayong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arisan dan posyandu 2. Gotong royong

Sumber: Wawancara dengan Ketua Ibu PKK, 2020.



3. Struktur Gampong Peunayong



Sumber: *Sekretariat Gampong Peunayong, 2020*

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Kawasan Peunayong.

Menurut Huraerah, bentuk partisipasi dapat dilihat dari Partisipasi Buah Pikiran, Partisipasi Tenaga, Partisipasi Harta Benda, Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, Partisipasi Sosial. Bentuk Partisipasi yang dilakukan Etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong hanya terlihat pada partisipasi buah pemikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi sosial, sebagai berikut⁶¹:

1. Partisipasi Buah Pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Bentuk partisipasi pemikiran yang diberikan masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan Kawasan Peunayong terdapat pada kegiatan-kegiatan musyawarah atau rapat yang dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Gampong Peunayong, Bapak T. Marwan Syahputra.

“..Masyarakat Tionghoa ikut kalau ada rapat yang dilakukan, kadang mereka juga kasih usulan mengenai kebutuhan mereka. Mereka aktif berbicara, tetapi hanya orang-orang tertentu aja”.

2. Partisipasi Tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan

⁶¹ Septyasa, Nuring L. 2013. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 1, No 1, Januari 2013. Hal 61.

sebagainya. Partisipasi Tenaga yang diberikan masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Peunayong dilihat dari kegiatan-kegiatan seperti posyandu, poswindu, arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Hal ini disampaikan oleh Ketua PKK Gampong Peunayong, Ibu Nursia.⁶²

“...Ikut, karna bagian dari pokja ada orang Tionghoa, tapi tidak semua ikut karna mereka punya kesibukan sendiri”.

Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris Gampong Peunayong Bapak T. Mirwan Saputra.

“...itu pembangunan yang keseluruhan, ada dana, seperti pembangunan jalan, saluran selokan, pembangunan bale dan juga kegiatan musyawarah, posyandu, pembagian BLT, kegiatan pendataan penduduk gitu”.

3. Partisipasi Sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban. Partisipasi Sosial yang dilakukan Masyarakat Etnis Tionghoa yaitu seperti yang disampaikan oleh sekretaris Gampong Peunayong Bapak T. Mirwan Saputra.

“...itu pembangunan yang keseluruhan, ada dana, seperti pembangunan jalan, saluran selokan, pembangunan bale dan juga kegiatan musyawarah, posyandu, pembagian BLT, kegiatan pendataan penduduk gitu”.

⁶² Nursia, Ketua Ibu PKK di *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020.

Berdasarkan bentuk partisipasi yang telah di uraikan di atas, Masyarakat Etnis Tionghoa sudah terlihat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Gampong Peunayong seperti Posyandu, poswindu, arisan, kegiatan sosial seperti penyaluran BLT untuk Covid 19 dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi kegiatan yang dilakukan hanya sebagai orang atau perwakilan dari masyarakat Etnis Tionghoa saja, keterlibatannya masih sangat rendah, dibuktikan dengan kehadiran masyarakat Etnis Tionghoa yang masih minim.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Peunayong, masyarakat Etnis Tionghoa sudah ikut serta dalam pembangunan Gampong Peunayong, tetapi keikutsertaannya masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator partisipasi :

Indikator Partisipasi yang dilakukan dalam Pembangunan Kawasan Peunayong.

1. Kesetaraan.

kesetaraan merupakan suatu keterampilan, kemauan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan proses pembangunan tanpa memperhitungkan jenjang dalam suatu pihak. Menurut hasil penelitian di Gampong Peunayong, sudah terdapat kesetaraan antara masyarakat pribumi dan Etnis Tionghoa, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Gampong Peunayong, Bapak T. Mirwan Sahputra.

“...sama, tidak ada di bedakan, karna disinipun kebanyakan masyarakat etnis Tionghoa, namun hak kesetaraannya kalau masyarakat pribumi boleh menyampaikan dan masyarakat Tionghoapun boleh menyampaikan juga seperti yang difikirkan oleh mereka juga. Dan tidak ada yang membeda-bedakan antara keduanya”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ibu Arninda ST.⁶³

“...sama, dan tidak di bedakan juga antara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat Non Tionghoa , hanya dalam agama saja yang membedakannya”.

Hal serupa lainnya juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Etnis Tionghoa, Ibu Kusmeity.⁶⁴

“...secara verbal dikatakan sama, tetapi tidak semua yang ikut”.

Menurut beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa kesetaraan yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada masyarakat pribumi dan Etnis Tionghoa sudah sangat baik. Masyarakat sudah terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan tanpa memandang etnis dari masyarakat itu sendiri.

2. Transparansi

Transparansi adalah keharusan semua pihak menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Peunayong, pemerintah Gampong Peunayong sudah menerapkan transparansi ke dalam

⁶³ Arninda ST, Kepala Seksi Pemerintahan di *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020.

⁶⁴ Kusmeity, Sekretaris Hakka di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020.

kegiatan yang dilakukan. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Gampong Peunayong, Bapak T. Mirwan Sahputra.

“..transparansi dilakukan yang pertama melibatkan mereka dalam tim perencanaan. Kedua, setiap kegiatan-kegiatan kita *publish*, baik melalui papan informasi dan media *website*”.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Ibu Arninda ST, yaitu:⁶⁵

“..bisa kita lihat dari transparansi, di baliho terus melalui musyawarah, baru ke Ulee Jurong gitu”.

Kemudian wawancara bersama masyarakat Etnis Tionghoa Ibu kusmeity, juga menyampaikan pernyataan yang sama.⁶⁶

“...transparansikan, untuk rapat-rapat ada diundang, ada mengundang orang-orang kita, hanya karena segi Peunayong rata-ratakan orang jualan, sibuk, jadi itulah gak datang ikut rapat, disosialisasikan mungkin ada , cuman partisipasinya kurang lah untuk mau ikut campur”.

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Peunayong untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat juga sudah sangat baik.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak,

⁶⁵ Arninda ST, Kepala Seksi Pemerintahan di *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020.

⁶⁶ Kusmeity, Sekretaris Hakka di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020.

sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan dan saling memberdayakan satu sama lain. Pemberdayaan yang dilakukan di Gampong Peunayong adalah sosialisasi tentang pentingnya dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan di gampong, sehingga masyarakat Etnis Tionghoa terlibat dalam beberapa kegiatan yang ada di Gampong Peunayong. Hal ini ditegaskan oleh sekretaris *Gampong* Peunayong Bapak T. Mirwan Sahputra.⁶⁷

“...memberikan sosialisasi setiap bulannya, maupun masyarakat Etnis Tionghoa dan masyarakat Non Tionghoa”. Sehingga mereka mau terlibat dalam posyandu, sebagian dari mereka juga menjadi kader-kader posyandu juga, pospindu, cina balita, merkapun setiap bulannya ada kegiatan seperti kegiatan posyandu terkait dengan ibu hamil, pospindu, lansia, mereka selain kegiatan yang telah ditetapkan misalnya satu bulan sekali melakukan senam dan memberikan motivasi bagi anak-anak”.

4. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. Menurut hasil penelitian, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Etnis Tionghoa hanya terlihat dengan sesama mereka. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris *Gampong* Peunayong Bapak T. Mirwan Sahputra, sebagai berikut.⁶⁸

“...hanya sebagian aktif, sebagian tidak aktif karna mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya tetapi jika ada kesempatan datang”.

⁶⁷ T. Mirwan Sahputra, Sekretaris *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020.

⁶⁸ T. Mirwan Sahputra, Sekretaris *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020.

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Ibu Marlina masyarakat Non Tionghoa/pribumi yaitu:⁶⁹

“... kalau itu hak masing-masing aktif saya kira aktif misalnya buat apa gitu kan, mungkin di bagi kelompok gitu.

Berdasarkan keempat indikator partisipasi di atas, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Gampong Peunayong sudah memberikan kesetaraan, transparansi, pemberdayaan dan kerjasama yang baik, tetapi masyarakat Etnis Tionghoa yang belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Gampong Peunayong karena beberapa hal lainnya.

4.1.2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Kawasan Peunayong.

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris *gampong* Peunayong Bapak T. Mirwan Sahputra penyebab faktor partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Kawasan Peunayong yaitu:⁷⁰

1. Pekerjaan atau Kesibukan

Masyarakat Peunayong dikenal dengan masyarakat pedagang, hal ini dapat membuat kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dan musyawarah yang dilakukan di Gampong tersebut.

“...karena ada kegiatan sendiri di lingkungan dengan aktifitas sendiri. Dan kegiatan mereka berdagang, jadi mereka ini susah untuk kita libatkan. Karena kalau kita libatkan kesempatan untuk datang

⁶⁹ Marlina, masyarakat pribumi di *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alama Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020.

⁷⁰ T. Mirwan Sahputra, Sekretaris *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020.

berpartisipasi itu sangat kurang kita bilang karena kalau kita datang akhirnya usaha mereka tutup”.

Hal yang berbeda ditegaskan oleh ibu kusmeity masyarakat Etnis Tionghoa yaitu:⁷¹

“...mereka tersebut sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa ditinggalkan maka dari itu lah terkadang mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut.”

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Ibu Marlina masyarakat Non Tionghoa/pribumi yaitu:⁷²

“... karena masyarakat Tionghoa sibuk dengan pekerjaannya dan susah untuk berpartisipasi namun ada juga sebagian ikut berpartisipasi, cuman gak semua”.

2. Kesadaran Masyarakat dalam berpartisipasi

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hariyanto masyarakat Etnis Tionghoa mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Gampong. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan pembangunan hanya dilakukan oleh perangkat Gampong atau orang-orang yang mempunyai jabatan di Gampong yaitu:⁷³

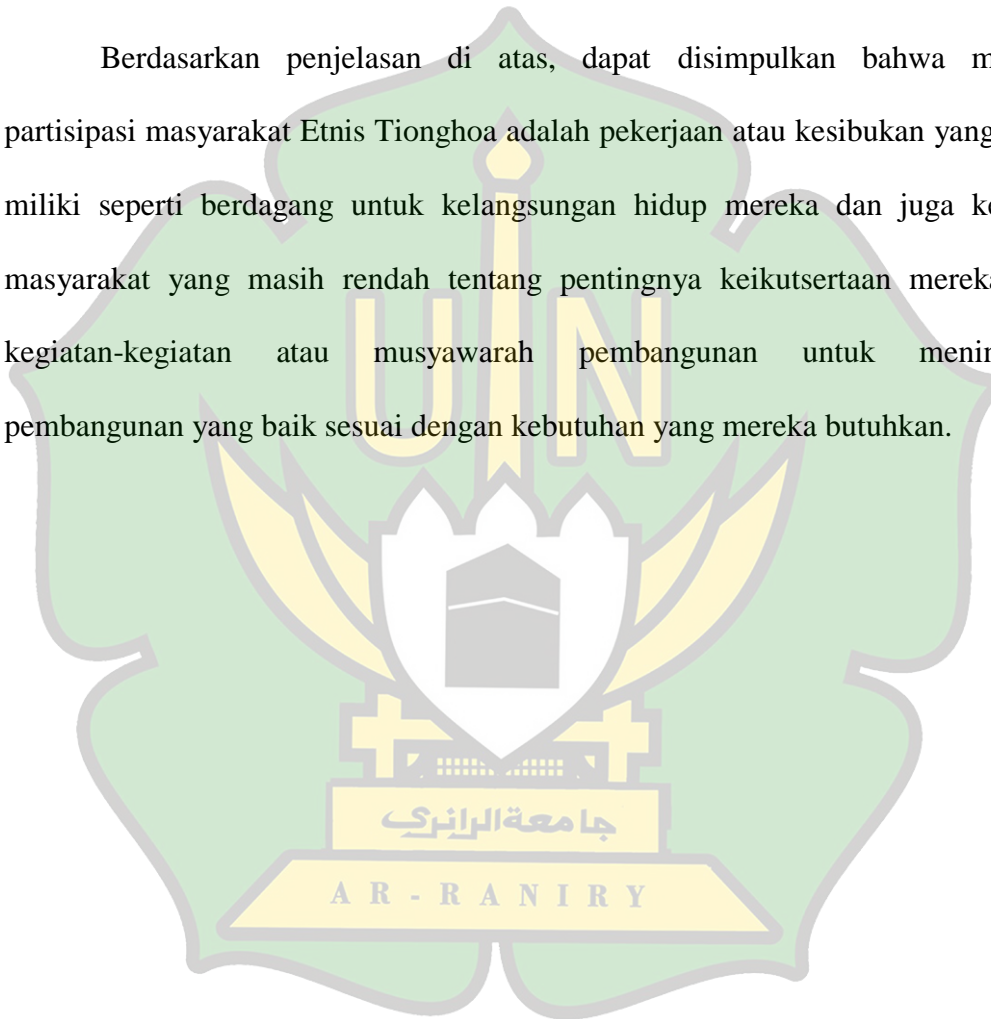
⁷¹ Kusmeity, Sekretaris Hakka di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2020

⁷² Marlina, masyarakat pribumi di *Gampong* Peunayong Kecamatan Kuta Alama Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2020.

⁷³ Harianto, warga Etnis Tionghoa, berdomisili di Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2020.

“...keterlibatan kita itukan harus melalui peran dari keuchik, keuchik gimana sih terhadap minoritas ini atau memang bersama-sama dinaikkan atau tidak, gitukan.” Kalau kita bilang kalau tidak berperan, berperan juga kita tetapi kalau mengambil suatu kebijakan besar seperti ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh gampong rapat-rapat besar itu ya, kebanyakan sih, gak dilibatkan. Karena yang dilibatkan biasaya orang-orang yang mempunyai jabatan saja”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa adalah pekerjaan atau kesibukan yang mereka miliki seperti berdagang untuk kelangsungan hidup mereka dan juga kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan atau musyawarah pembangunan untuk meningkatkan pembangunan yang baik sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan.



BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di *Gampong* Peunayong Kecamatan Kota Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, wawancara dengan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong tergolong masih rendah, Etnis Tionghoa yang terlibat dalam anggota aparat *gampong* saja yang berperan aktif dalam pembangunan ini, seperti pengurus posyandu. Beberapa program *gampong* yang dibangun oleh kolaborasi antara pribumi dan etnis Tionghoa yaitu pembangunan jalan, saluran selokan, pembangunan balai, kegiatan musyawarah, posyandu, pembagian BLT, dan kegiatan pendataan penduduk. Tidak ada perbedaan hak antar keduanya, sama-sama bebas berpendapat karena sebagian besar masyarakat *gampong* Peunayong terdiri dari etnis Tionghoa.
2. Faktor penyebab partisipasi masyarakat Etnis Tionghoa dalam pembangunan dilihat dari segi pekerjaan dan kesibukan yang mereka miliki dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan mayoritas penduduk sebagai pedagang mereka lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan *gampongnya* sehingga masyarakat pribumi kurang memberikan perhatian kepada etnis ini, khususnya yang memegang wewenang *gampong*

tersebut, seperti kurang memberi tanggung jawab mengenai pembangunan *gampong*.

4.2 Saran

Berdasarkan berbagai data hasil penelitian maka perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada perangkat Gampong agar membentuk pola komunikasi yang baik dengan masyarakat Etnis Tionghoa supaya tidak terjadi miskomunikasi, membuka informasi mengenai setiap kegiatan atau peluang agar seluruh masyarakatnya mempunyai kesamaan hak dalam berperan untuk pembangunan gampong serta setiap individu tidak dapat menyalahkan pihak manapun karena sudah didasari dengan sifat keterbukaan.
2. Kepada Masyarakat Etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi untuk saling berkerja bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan Gampong Peunayong.
3. Sebaiknya dalam masalah pembangunan gampong, masyarakat pribumi dan etnis tionghoa tidak memandang ras atau suku, sehingga tidak terbuka celah untuk membeda-bedakan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

- Al-Qur'an, Surat *An-Nahl*, ayat 90. Tentang keadilan.
 Al-Qur'an Surat *At-Taubah*, Ayat 122. Tentang pendidikan dalam pembangunan.
 Al-Qur'an Surat *A-Hujurat*, Ayat 13. Tentang Kesetaraan.

Buku

- Aristo. *Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis*. 2004..
- Basuki Sulistyio, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Alfabeta, 2016).
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kualitatif (Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Public serta Ilmu-ilmu Social lainnya*, 2019.
- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Leo Suryadinata. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*,(Jakarta:Kompas Media Nusantara,2010).
- Pasaribu, I.I, dan Simajuntak. B., *Sosiologi pembangunan*, Tarsito, Bandung. Peraturan Perundang: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 1992.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: refleksi penegmbangan pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010).
- M. Yatim Abdullah, *pengantar Stui Etika*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006).
- Narwawi Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).
- Nia K. Pontoh dan iwan setiawan, *Struktur Tata Ruang Kota*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008).
- Sastroptoerto. R.A.S., *Partisipasi komunikasi, persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*, Alumni: Bandung, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dina Aksa, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2012).

Surdiman Adi Putra, *Peran Kaum Muda dalam Pembangunan*. UIN Alauddin Makassar 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Aneka Cipta,2020).

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, bandung: Cv Alfabet, 2014.

Widiastuti. *Prinsip partisipasi*. Jakarta: CV. Sagung Seto.2008.

Yaumi, Muhammad, *Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2016).

Jurnal

Agung Suharyanto, 2014, Jurnal : *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Ilmu Pemerintahan dan Sosial politik UMA 2 (2). Diakses pada tgl 08 Januari 2020.

Andi Nurhalimah, 2018. Jurnal : *Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Dana Desa*. Vol 6 No 2.

Ahmad Helmy Fuady, 2012, Jurnal : *Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pascaerde Baru*. Vol 38 No 2. Lembaga Pengetahuan Indonesia

Bobby Irwansyah, 2010, jurnal : *Tingkat Ekonomi dan Partisipasi Etnis tionghoa dalam Pilkada Kota Medan*. Vol 2 No 2 POLITEIA diakses pada tgl 08 Januari 2020 pkl. 14:30.

Badratun Nafis, 2020, Jurnal : *Analisis Pelaksanaan Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Gampong Meunasah Kulam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya*.

Dea Deviyanti, 2013, Jurnal : *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Vol 1 No 2, ISSN 0000-0000, Administrasi Negara, fisip,-unmul.

Dara Ayu Idraswari, 2019 Jurnal : *Analisis Dampak Pembangunan Jalan Layang (Flyover) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Indah Tri Fitriyanti. 2017, Jurnal : Ramadan Setiawan dkk. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Ikhda Novita Putri dan Dahlia. 2019, Jurnal : *Kecerdasan Emosional Dan Penyesuaian Sosial Pada Remaja Etnis Tionghoa Di Kota Banda Aceh*.Seurune, Psikologi Unsyiah, Prodi Psikologi
- Melia Seti Satya, 2016, Jurnal : *Strategi Masyarakat Etnis Tionghoa dan Melayu Bangka dalam Membangun Interaksi Sosial Untuk Memperkuat Kesatuan Bangsa*” Pendidikan Ilmu Sosial Vol 25 No 1, Diakses pada tgl 09 januari 2020 pk1.20:05.
- Indah Tri Fitriyanti. 2017, Jurnal : Ramadan Setiawan dkk. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang)*., Universitas Maritim Raja Ali.
- Risfandy. 2017, Jurnal : *Tingkat Efektivitas Sosialisasi Komisi Independen Pemilihan*. Vol 2 No 3 Kota Banda Aceh dalam *Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal fisip unsyiah.
- Septyasa, Nuring L. 2013. Jurnal : *Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Vol 1, No 1, Januari 2013, kebijakan dan Manajemen Publik..
- Sanjaya, Roy Topan.2013, Jurnal : *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara*.
- Sigalingging, Angelius Henry, dkk. 2014, Jurnal : *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*, Vol 2 No 2, ISSN: 2088-527x, Administrasi Publik.
- Siyono, Sandu, 2015, Jurnal : *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta,: Literasi, Media Publishing).
- Syukur Kholi, 2017. Jurnal : *Peran Komunikasi Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat (bpm) Dalam Pembangunan Sosial dan Keagamaan*. Vol 1 No 2, UIN Sumatera Utara.
- Suryana, 2010. Jurnal : *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku ajaran perkulihan, Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses pada tanggal 3 juli 2020.

- Surdiman Adi Putra, 2017, Jurnal : *Peran Kaum Muda dalam Pembangunan*. UIN Alauddin Makassar.
- Suharsimi arikunto, 2020, Jurnal : prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta:Aneka Cipta).
- Sutupo, H. B. (2002), Jurnal : *Metedologi penelitian kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret Universitay Pres Diakses 17 Oktober 2018.
- Sembodo dan Fathurrahman Fadil, 2013, Jurnal : *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah*, Vol. II, Edisi 2, : Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal (Semarang : Universitas Diponegoro)
- Totok mardikanto dan poerwoko soebianto, 2014, Jurnal : *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*, bandung: Cv Alfabet.
- Widiastuti. 2008, Jurnal : *Prinsip partisipasi*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Yaumi, Muhammad, 2016, Jurnal : *Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta : Kencana).
- Vivi Herlina, 2007, Jurnal : *Analisi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisikdi Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci*. IPTEKS Terapkan. ISSN : 1979-9292. Hlm : 221. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2020, pkl 21:00.
- Tauchid Noor, 2009, Jurnal : *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum* ,Vol.11,No.1, Konstitusi
- Hadi, Apdul.2014, Jurnal : *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan* , di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Geresik. Vol 17, No. 1 ISSN 1411-0199.

Skripsi

- Andi Ripai, 2013, Skripsi : *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Universitas Hasanuddin.
- Indah tri fitriyanti, ramadhani setiawan, dkk, 2017. Skripsi : *Analisis tingkat partisipasi masyarakat etnis tionghoa dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)*. universitas maritin raja ali haji.
- Koenjaraningrat dalam Nurma Juwita, 2016, Skripsi : *Persepsi Masyarakat Pendatang Terhadap Sikap Bela Negara di Kampung Panaragan*

Jaya Indah Kabupaten Tulang Bawang Barat, (Bandar Lampung : Universitas Lampung.

M. Dirga firgiawan, 2018, *Skripsi : Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang)*, Universitas Uin Alauddin Makassar.

Monique Sumampouw dan Desi Usmaniya, 2013, *Skripsi: Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukkut Bestari Kota Tanjungpinang*, (Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Wirda Afni, 2013, *Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wahyuddin (2018). *Skripsi : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah

UUD 1945

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi* Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Artikel/Website Resmi Pemerintah

Agus Setyadi. Peunayong, Kampung China di Aceh yang Ada Sejak Sultan Iskandar Muda. diterbitkan dari detik.com pada Rabu, 07 Feb 2018. Diakses pada 08 Januari 2020, pkl 14:00.

Good Governance. Dalam Islam, diakses <http://jmf.fisip.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam>. pada tanggal 14 Juli 2020.

Majmauz Zawaid jilid 9 halaman 53 hadis nomor 2696 diakses http://carihadis.com/Majmauz_Zawaid/2696 pada tanggal 15 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Diakses dari <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html/> pada tanggal 25 April 2020.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 378/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

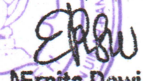
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Tasnim Idris, MA. | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Bihuna Bilnafsih |
| NIM | : 160802065 |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara |
| Judul | : Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa Dalam Pembangunan Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh |
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1246/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Keuchik Peunayong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BIHUNA BILNAFSIH / 160802065**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Jalan utama rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan Peunayong kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Desember
2020

A R - R A N I R Y

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG PEUNAYONG
JL. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592 Kode Pos 23122
BANDA ACEH

SURAT SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

No : 070/73/PY/KA/2020

Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BIHUNA BILNAFSIH**
NIM : 160802065
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor B-1246/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Izin Penelitian di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan judul (**Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh**) Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Gampong Peunayong.

Demikian Surat Selesai Melakukan Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2020
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG



T. Sabri Harun S. Ag
T. SABRI HARUN S. Ag